

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT serta limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dapat terlaksana secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mencakup segala bidang, sehingga perbaikan di segala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal diinginkan baik oleh pemerintah terlebih oleh masyarakat, begitupula dengan proyeksi kedepannya. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang tentunya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah merupakan penjabaran dari Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Anggaran.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan Renja Kecamatan Maritengngae masih memerlukan kesempurnaan di masa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap Renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pangkajene, 9 Mei 2023
CAMAT MARITENGGAE

Drs. MUSTARI KADIR, M. Si

NIP: 19680119 199112 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	31
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	33
BAB V. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	42
5.1. Indikator Kinerja Utama	42
5.2. Indikator Kinerja Kunci	43
BAB VI. PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Perencanaan pembangunan, dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Pembangunan merupakan proses yang berjalan secara simultan yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan arah dan tindakan yang diharapkan di masa depan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Pelaksanaan merupakan aktualisasi dari perencanaan yang telah ditetapkan, sedangkan pengendalian merupakan proses pengarahan kegiatan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sedangkan evaluasi merupakan aktifitas menilai hasil yang terjadi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan bersama. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Maritengngae mengemban tugas dan tanggungjawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistimatis, sinergis dan komprehensif sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikannya, secara fungsional Kecamatan Maritengngae dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan setiap tahun. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi

kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renja Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Maritengngae. Sejalan dengan itu, muatan Renja Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang selama 1 (satu) tahun anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Renja Kecamatan Maritengngae tahun 2024 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung pencapaian kinerja aparatur di lingkup Pemerintah Kecamatan Maritengngae dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Maritengngae dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya.

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4700);
4. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006, Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang organisasi Perangkat Daerah Kecamatan serta Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 26;

14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi. Uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk menjabarkan Renstra Kecamatan Maritengngae tahun 2024 – 2026 yang merupakan perencanaan satu periode (3 tahun) ke dalam perencanaan yang sifatnya tahunan (1 tahun).

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

- Menyiapkan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Maritengngae;
- Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistimatis Renja Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
- BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU terdiri atas beberapa bagian yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN terdiri atas beberapa bagian yaitu Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Maritengngae
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH terdiri atas beberapa bagian yaitu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, dan Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja merupakan program kerja kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2023 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang mencakup Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat terdiri dari dua Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang mencakup Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan serta Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan.
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mencakup Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari tiga Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan

Permusyawaratan Desa, serta Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2023 untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel TC 29.

TABEL TC-29 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD : KECAMATAN MARITENGGAE

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2023) TARGET APBD	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2023		CAT			
						TARGET RENJA OPD TAHUN 2022	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI I CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)				
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11	12			
7															
7		Unsur Kewilayahan													
7	1	Kecamatan													
7	.1	.2													
7	.1	.2	204	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	100	100	100	100	300	300	
7	.1	.2	204	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%	100	100	100	100	300	300	
7	.1	.2	204	.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1	Laporan	2	1	1	100	1	4	400
7	.1	.2	204	.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	2	1	1	100	1	4	400

7	.1	.3	0		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%		100				100	33	33		
7	.1	.3	201	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	.1	.3	201	.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	1	1	1	100	1	3	300			
7	.1	.3	.202	0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%		100.0				100	33	33		
7	.1	.3	.202	.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23	Unit	21	25	11	44	23	55	239			
7	.1	.3	.202	.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,652	Pokmas/Ormas	21	12	12	100	1,652	1,685	102			
7	.1	.3	.202	.4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7	Laporan	7	7	7	100	7	21	300			
7	.1	.6	0		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	100	100	100	100	100	150	100			
7	.1	.6	.201	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	100	100	100	100	100	150	150			
7	.1	.6	.201	.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	5	Dokumen	5	5	5	100	5	15	300			

X	XX	.1	.206	.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	11,457	Lembar	25,521	5	4	80	11457	36,982	323	
X	XX	.1	.206	.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12	Bulan	30	12	12	100	12	54	450	
X	XX	.1	.206	.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	55	Kali	93	55	11	20	55	159	289	
X	XX	1	.207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%		100			100	33	33	
X	XX	1	.207	.5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan	1	Paket	24	1	0	-	1	25	2,500	
					XXX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	2	Unit	-	-	0	-	2	2	100	
X	XX	1	.207	.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2	Unit	12	2	2	100	2	16	800	
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	55	Unit	8	45	8	18	55	71	129	
X	XX	.1	.208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%		100			100	33	33	
X	XX	.1	.208	.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	850	Lembar	30	12	12	100	850	892	105	
X	XX	.1	.208	.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	12	Bulan	30	12	12	100	12	54	450	

X	XX	.1	.208	.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Bulan	30	12	12	100	12	54	450	
X	XX	.1	.209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan	100	%		100		100	33	33		
X	XX	.1	.209	.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	35	Unit	30	35	12	34	35	77	220	
X	XX	.1	.209	.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	14	Unit	6	16	11	69	14	31	221	
X	XX	.1	.209	.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	6	Unit	6	4	4	100	6	16	267	
X	XX	.1	.209	.1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara				3		-				

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara kelembagaan, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di Kecamatan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Maritengngae diukur berdasarkan pencapaian terhadap target capaian indikator kinerja pada renstra. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Maritengngae tahun 2022 yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai nilai 81,25 dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 80
2. Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik mencapai nilai 100% dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 100%
3. Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan mencapai nilai 100% dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 100%
4. Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi mencapai nilai 100% dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 100%.

Untuk jelasnya, dapat dilihat pada Tabel TC 30.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai lebih dari target yang diharapkan disebabkan indikator yang di survei memiliki nilai rata-rata pelayanan di atas nilai harapan.

**TABEL TC-30 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

OPD : KECAMATAN MARITENGGAE

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RESTRA OPD			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			77	80	81	79,925	81,25	84,22	85,67	
2	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik			100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan			100	100	100	80	81	100	100	
4	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi			100	100	100	100	100	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan isu-isu strategis dalam memproyeksi kondisi yang diharapkan kedepan dalam kaitannya dengan bidang tugas Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan karena isu tersebut akan memiliki arti fungsional apabila dibahas dalam kaitannya dengan kondisi realitas organisasi.

Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan agar memudahkan dalam mengorganisir isu maka dilakukan identifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Maritengngae bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Pelayanan prima, kantor kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

Lingkup analisis Kinerja pelayanan di Kecamatan Maritengngae meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1) Lingkungan Internal

Peluang:

1. Visi dan Misi organisasi yang jelas
2. Kekuatan Hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
3. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
4. Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan, dan
5. Adanya sarana dan prasarana.

Tantangan:

1. Kualitas SDM yang belum memadai
2. Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan kecamatan yang diakibatkan belum jelasnya target sasaran yang merupakan ukuran pencapaian yang ingin dicapai, dan
3. Belum optimalnya data-data kondisi ekonomi sosial dan budaya yang menjadi bahan analisis dalam perumusan perencanaan di tingkat Kecamatan.

2) Lingkungan Eksternal

Peluang:

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
2. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik

3. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
4. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
5. Diklat peningkatan kualitas aparatur
6. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
7. Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram.

Tantangan:

1. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
2. Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
3. Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat
4. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
5. Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja, pendanaan, dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Maritengngae berdasarkan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah se Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Maritengngae.

Tahun anggaran 2024 Kantor Kecamatan Maritengngae merencanakan 5 (lima) program, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Review terhadap rancangan awal RKPD perlu dilakukan untuk mengukur kesesuaian Rancangan Awal RKPD dengan analisis kebutuhan organisasi. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel TC 31.

TABEL TC-31 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD : KECAMATAN MARITENGGAE

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UNSUR KEWILAYAHAN											
KECAMATAN					7,674,448,433					7,674,448,433	
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	4,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	4,000,000	
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	4,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	4,000,000	
1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan	2,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan	2,000,000	
1.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	2,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	2,000,000	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	50,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	50,000,000	

2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	50,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	50,000,000	
2.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	50,000,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	50,000,000	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Maritengngae	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	1,876,786,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Maritengngae	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74%	1,876,786,000	
3.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Maritengngae	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	2,000,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Maritengngae	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	74%	2,000,000	
3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	2,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	2,000,000	
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Maritengngae	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74%	1,874,786,000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Maritengngae	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74%	1,874,786,000	
3.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel Pangkajene, Kel Lautang Benteng, Kel Lakessi, Kel Wala, Kel Rijang Pittu, Kel Majelling, Kel Majelling Wattang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	665,826,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel Pangkajene, Kel Lautang Benteng, Kel Lakessi, Kel Wala, Kel Rijang Pittu, Kel Majelling, Kel Majelling Wattang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	665,826,000	

3.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel Pangkajene, Kel Lautang Benteng, Kel Lakessi, Kel Wala, Kel Rijang Pittu, Kel Majelling, Kel Majelling Wattang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	210 Pokmas/Ormas	1,206,960,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel Pangkajene, Kel Lautang Benteng, Kel Lakessi, Kel Wala, Kel Rijang Pittu, Kel Majelling, Kel Majelling Wattang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	210 Pokmas/Ormas	1,206,960,000	
3.2.4	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7 Laporan	2,000,000	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7 Laporan	2,000,000	
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	6,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	6,000,000	
4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	6,000,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	6,000,000	
4.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	2,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	2,000,000	
4.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3 Dokumen	2,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3 Dokumen	2,000,000	
4.1.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	2,000,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	2,000,000	

5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5,737,662,433	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5,737,662,433	
5.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	6,160,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	6,160,000	
5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	2,780,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	2,780,000	
5.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Maritengngae	Jumlah dokumen RPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RPA-SKPD	3 Dokumen	390,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Maritengngae	Jumlah dokumen RPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RPA-SKPD	3 Dokumen	390,000	
5.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahna DPA-SKPD	3 Dokumen	390,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahna DPA-SKPD	3 Dokumen	390,000	
5.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Maritengngae	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	520,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Maritengngae	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	520,000	
5.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahna DPA-SKPD	3 Dokumen	780,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahna DPA-SKPD	3 Dokumen	780,000	
5.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Maritengngae	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1,300,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Maritengngae	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1,300,000	
5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4,650,786,282	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4,650,786,282	

5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Maritengngae	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	81 2 Org/Bln	4,650,786,282	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Maritengngae	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	812 Org/Bln	4,650,786,282	
5.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	279,799,151	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	279,799,151	
5.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Maritengngae	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Paket	8,785,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Maritengngae	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Paket	8,785,500	
5.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Maritengngae	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	8 Paket	12,511,100	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Maritengngae	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	8 Paket	12,511,100	
5.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Maritengngae	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 Paket	124,019,551	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Maritengngae	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 Paket	124,019,551	
5.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Maritengngae	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	8 Paket	29,334,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Maritengngae	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	8 Paket	29,334,000	
5.3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Maritengngae	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	8 Laporan	24,376,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Maritengngae	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	8 Laporan	24,376,000	
5.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Maritengngae	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8 Laporan	80,773,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Maritengngae	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8 Laporan	80,773,000	
5.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	296,516,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	296,516,000	
5.4.1	Pengadaan Mebel	Kecamatan Maritengngae	Jumlah paket mebel yang diadakan	16 Unit	60,632,000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Maritengngae	Jumlah paket mebel yang diadakan	16 Unit	60,632,000	
5.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	235,884,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	235,884,000	
5.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	398,024,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	398,024,000	

5.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	8 Laporan	10,910,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	8 Laporan	10,910,000	
5.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Maritengngae	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	8 Laporan	88,314,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Maritengngae	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	8 Laporan	88,314,000	
5.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Maritengngae	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	8 Laporan	298,800,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Maritengngae	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	8 Laporan	298,800,000	
5.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan	100%	106,377,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan	100%	106,377,000	
5.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Maritengngae	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	16 Unit	56,285,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Maritengngae	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	16 Unit	56,285,500	
5.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Maritengngae	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	16 Unit	12,744,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Maritengngae	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	16 Unit	12,744,000	
5.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 Unit	34,847,500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 Unit	34,847,500	
5.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 Unit	2,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 Unit	2,500,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Maritengngae pada tahun perencanaan 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah
2. Meningkatnya akses dan kesempatan kerja
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
4. Berkurangnya ketimpangan pendapatan
5. Membaiknya kehidupan sosial kemasyarakatan
6. Meningkatnya mitigasi kebencanaan
7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
8. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
9. Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Sidenreng Rappang maka semua hal tersebut di atas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Dan sehubungan bahwa Kecamatan Maritengngae bukanlah Perangkat Daerah pengemban delegasi yang menangani teknis pelaksana usulan masyarakat maka dalam Renja Kecamatan Maritengngae ini tidak terdapat usulan masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat dapat dilihat pada Tabel TC 32.

**TABEL TC-32 USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI
PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024**

OPD : KECAMATAN MARITENGGAE

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2024. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

- **PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan:**

Sasaran PN1 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan;
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industry pengolahan, (e) kontribusi PDB industry pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j) pertumbuhan ekspor industry pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

- **PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan:**

Sasaran PN2 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan dan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;

2. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.
- **PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**

Sasaran PN3 adalah sebagai berikut:

 1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata Kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 2. Meningkatnya perlindungan social bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan social, BAB IV 18 dan (b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan social pemerintah;
 3. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan Pendidikan dengan (a) menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (b) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (c) menurunkan prevalensi stunting pada balita, (d) menurunkan insidensi tuberculosis, (e) meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (f) meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun, (h) menurunkan persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, (i) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (j) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (k) harapan lama sekolah;
 4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
 5. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;
 6. Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam world class university, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat global innovation index.

PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Sasaran PN4 adalah sebagai berikut:

1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental, dan (b) peningkatan Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
2. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;
3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat social dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
4. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
5. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
6. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sasaran PN5 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) peningkatan rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) peningkatan persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d) peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);
2. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a) penurunan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/ 100 Km), (b) peningkatan persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop), (c) peningkatan kondisi jalur Kereta Api (KA) sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) peningkatan persentase capaian On Time Performance (OTP) transportasi udara;
3. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) kenaikan jumlah kota metropolitan dengan system angkutan umum massal perkotaan yang

- dibangun dan dikembangkan (kota) dan (b) peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan;
4. Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), dan (c) penurunan emisi GRK sector energi (juta ton);
 5. Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).

PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Sasaran PN6 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
2. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
3. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.

PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran PN7 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi public terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
2. Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional;
3. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan public nasional;

5. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

3.1.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dirumuskan dalam rangka mencapai target janji Bupati dan Wakil Bupati dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan:

1. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026
2. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022
3. Prioritas nasional dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024
4. Prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
5. RT/RW Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032;
6. Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Kedudukan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ke-1 (pertama) atau merupakan tahun awal dari proses penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Tema Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 adalah ***“Pemantapan Pemulihan Ekonomi, Daya Saing Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”***. Dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat
2. Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengembangan Perekonomian Daerah
3. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan ekonomi
4. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan
5. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
6. Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana

7. Peningkatan Aktivitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman

Perumusan isu strategis Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi Tahun 2023, arah kebijakan dari Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, arah kebijakan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 serta memperhatikan dinamika isu strategis global, nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Kerja adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Untuk mencapai misi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Maritengngae sebagai salah satu Perangkat Daerah pelaksana pencapaian misi tersebut maka Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas, maka ditetapkan beberapa sasaran strategis yang akan ditempuh yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum
2. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan

Selanjutnya tujuan dan sasaran Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang beserta indikator kinerjanya disajikan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang

Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Indikator	Target Kinerja 2024
Unsur Kewilayahan			
Tujuan; Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	Predikat Nilai SAKIP	$\frac{\text{Penilaian Komponen manajemen kinerja}}{\text{Bobot Penilaian}} \times 100\%$	C (47,22)
Sasaran 1; Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum}} \times 100\%$	100%
Sasaran 2; Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat i	Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemberdayaan}} \times 100\%$	74%
Sasaran 3; Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah uruan pembinaan dan pengawasan}} \times 100\%$	100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kecamatan Maritengngae dimana pada tahun 2024 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 81,55 persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan dengan baik dengan nilai 100%, dan persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi dengan baik dengan nilai 100%.

Perencanaan program tahun 2024 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

- a. Program pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Darah Kabupaten/Kota

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel TC 33 sedangkan uraian per unit organisasi dapat dilihat pada Lampiran 1.

**TABEL TC-33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

OPD : KECAMATAN MARITENGGAE

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7			Unsur Kewilayahan						
7	1		Kecamatan						
7	.1 .2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Maritengngae	100%	4,000,000		100%	4,040,000
7	.1 .2 204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Maritengngae	100%	4,000,000		100%	4,040,000
7	.1 .2 204 .2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kecamatan Maritengngae	3 Laporan	2,000,000	PAD	4 Laporan	2,020,000
7	.1 .2 204 .3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Maritengngae	3 Laporan	2,000,000	PAD	4 Laporan	2,020,000
7	.1 .5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Maritengngae	100%	50,000,000		100%	50,500,000

7	.1	.5	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Maritengnga e	100%	50,000,000			100%	50,500,000
7	.1	.5	201	.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Maritengnga e	2 Dokumen	50,000,000	PAD		2 Dokumen	50,500,000
7	.1	.3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Maritengnga e	100%	1,876,786,000			100%	1,895,553,000
7	.1	.3	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Maritengnga e	100%	2,000,000			100%	2,020,000
7	.1	.3	201	.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Maritengnga e	5 Laporan	2,000,000	PAD		5 Laporan	2,020,000
7	.1	.3	.202		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Maritengnga e	100%	1,874,786,000			100%	1,893,533,000

7	.1	.3	.202	.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel Pangkajene, Kel Lautang Benteng, Kel Lakessi, Kel Wala, Kel Rijang Pittu, Kel Majelling, Kel Majelling Wattang	21 Unit	665,826,000	DAU		21 Unit	672,484,000
7	.1	.3	.202	.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel Pangkajene, Kel Lautang Benteng, Kel Lakessi, Kel Wala, Kel Rijang Pittu, Kel Majelling, Kel Majelling Wattang	210 Pokmas/Ormas	1,206,960,000	PAD		210 Pokmas/Ormas	1,219,029,000
7	.1	.3	.202	.4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Maritengngae	7 Laporan	2,000,000	PAD		7 Laporan	2,020,000
7	.1	.6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Maritengngae	100%	6,000,000			100%	6,060,000
7	.1	.6	.201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Maritengngae	100%	6,000,000			100%	6,060,000

7	.1	.6	.201	.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Maritengngae	3	Dokumen	2,000,000	PAD		4	Dokumen	2,020,000
7	.1	.6	.201	.7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Maritengngae	3	Dokumen	2,000,000	PAD		4	Dokumen	2,020,000
7	.1	.6	.201	.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Maritengngae	3	Dokumen	2,000,000	PAD		4	Dokumen	2,020,000
X	X X	.1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Maritengngae	100%		5,737,662,433			100%		5,795,059,664
X	X X	.1	.201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Maritengngae	100%		6,160,000			100		7,590,000
X	.X X	.1	.201	.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Kecamatan Maritengngae	3	Dokumen	2,780,000	PAD		4	Dokumen	3,040,000

X	.X X	.1	.201	.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RPA-SKPD	Kecamatan Maritengngae	3	Dokumen	390,000	PAD		4	Dokumen	1,170,000
X	.X X	.1	.201	.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi pemyusunan dokumen perubahna DPA-SKPD	Kecamatan Maritengngae	3	Dokumen	390,000	PAD		4	Dokumen	520,000
X	.X X	.1	.201	.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Maritengngae	3	Dokumen	520,000	PAD		4	Dokumen	520,000
X	.X X	.1	.201	.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahna DPA-SKPD	Kecamatan Maritengngae	3	Dokumen	780,000	PAD		4	Dokumen	910,000
X	.X X	.1	.201	.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Maritengngae	3	Laporan	1,300,000	PAD		4	Laporan	1,430,000
X	X X	.1	.202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Maritengngae		100%	4,650,786,282				100%	4,697,320,664
X	X X	.1	.202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Maritengngae	812	Org/Bln	4,650,786,282	DAU		85 4	Org/Bln	4,697,320,664

X	X X	.1	.206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Maritengnga e	100%	279,799,151			100%	282,593,000
X	X X	.1	.206	.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kecamatan Maritengnga e	8 Paket	8,785,500	DAU,PA D		8 Paket	8,873,000
X	X X	.1	.206	.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kecamatan Maritengnga e	8 Paket	12,511,100	DAU,PA D		8 Paket	12,636,000
X	X X	.1	.206	.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kecamatan Maritengnga e	8 Paket	124,019,551	DAU,PA D		8 Paket	125,258,000
X	X X	.1	.206	.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan kantor yang disediakan	Kecamatan Maritengnga e	8 Paket	29,334,000	DAU,PA D		8 Paket	29,627,000
X	X X	.1	.206	.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Kecamatan Maritengnga e	8 Laporan	24,376,000	DAU,PA D		8 Laporan	24,619,000
X	X X	.1	.206	.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Maritengnga e	8 Laporan	80,773,000	DAU,PA D		8 Laporan	81,580,000
X	X X	1	.207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Maritengnga e	100%	296,516,000			100%	298,113,000
X	X X	1	.207	.5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan	Kecamatan Maritengnga e	16 Unit	60,632,000	DAU,PA D		16 Unit	61,238,000
X	X X	1	.207	.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Maritengnga e	24 Unit	235,884,000	DAU,PA D		16 Unit	236,875,000

X	X X	.1	.208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Maritengngae	100%	398,024,000			100%	402,004,000
X	X X	.1	.208	.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Kecamatan Maritengngae	8 Laporan	10,910,000	DAU,PA D		8 Laporan	11,019,000
X	X X	.1	.208	.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	Kecamatan Maritengngae	8 Laporan	88,314,000	DAU,PA D		8 Laporan	89,197,000
X	X X	.1	.208	.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kecamatan Maritengngae	8 Laporan	298,800,000	DAU,PA D		8 Laporan	301,788,000
X	X X	.1	.209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan	Kecamatan Maritengngae	100%	106,377,000			100%	107,439,000
X	X X	.1	.209	.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kecamatan Maritengngae	16 Unit	56,285,500	DAU,PA D		16 Unit	56,848,000
X	X X	.1	.209	.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kecamatan Maritengngae	16 Unit	12,744,000	DAU,PA D		16 Unit	12,871,000
X	X X	.1	.209	.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /	Kecamatan Maritengngae	3 Unit	34,847,500	DAU,PA D		4 Unit	35,195,000

						direhabilitasi							
X	X X	.1	.209	.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kecamatan Maritengngae	3 Unit	2,500,000	DAU,PA D		4 Unit	2,525,000
J U M L A H									7,674,448,433				7,751,212,664

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran membutuhkan penetapan target kinerja yang akan dijadikan target dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan target kinerja menjadi sangat penting karena akan menjadi penuntun dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya target kinerja Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang terbagi atas:

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Maritengngae adalah sebagai berikut :

1. Predikat Nilai SAKIP
2. Persentase urusan pemerintahan umum dijalankan dengan baik
3. Persentase urusan pemberdayaan masyarakat dijalankan dengan baik
4. Persentase urusan pembinaan dan pengawasan dijalankan dengan baik

Tabel 6.1

NO	INDIKATOR	TARGET 2024	KONDISI AKHIR
1	Predikat Nilai SAKIP	C	C
		(47,22)	(47,22)
2	Persentase urusan pemerintahan umum dijalankan dengan baik	100%	100%
3	Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik	100%	100%
4	Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik	100%	100%

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi untuk membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan OPD.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari OPD Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan
4. Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 6.2

NO	INDIKATOR	TARGET 2024	KONDISI AKHIR
1	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%
2	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	100%
4	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%
5	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dibuat dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Maritengngae dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Maritengngae sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya
2. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Maritengngae
3. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan Maritengngae
4. Kecamatan Maritengngae berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Rencana Strategis Kecamatan Maritengngae Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Semoga dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.

**LAMPIRAN 1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PER UNIT ORGANISASI KANTOR KECAMATAN
MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024**

Kode	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KECAMATAN		KELURAHAN PANGKAJENE		KELURAHAN LAKESSI		KELURAHAN LAUTANG BENTENG		KELURAHAN WALA		KELURAHAN RIJANG PITTU		KELURAHAN MAJELLING		KELURAHAN MAJELLING WATTANG		JUMLAH	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19
7	UNSUR KEWILAYAHAN																				
7.1	KECAMATAN				5,067,488,433		468,080,000		318,800,000		327,680,000		313,280,000		449,840,000		395,360,000		333,920,000		7,674,448,433
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	4,000,000															100	4,000,000
7.1.2.204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100	4,000,000															100	4,000,000
7.1.2.204.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	3	2,000,000															3	2,000,000
7.1.2.204.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	3	2,000,000															3	2,000,000
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	50,000,000															100	50,000,000

7.1.5 .201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	50,000,000															100	50,000,000
7.1.5. 201.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	2	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50,000,000
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	%	100	4,000,000	100	368,080,000	100	218,800,000	100	227,636,000	100	228,280,000	100	349,840,000	100	276,640,000	100	203,510,000	100	1,876,786,000
7.1.3 .201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	%	100	2,000,000															100	2,000,000
7.1.3. 201.3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2,000,000
7.1.3 .202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	%	100	2,000,000	100	368,080,000	100	218,800,000	100	227,636,000	100	228,280,000	100	349,840,000	100	276,640,000	100	203,510,000	100	1,874,786,000
7.1.3. 202.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit			3	100,000,000	3	100,000,000	3	99,956,000	3	115,000,000	3	100,000,000	3	81,280,000	3	69,590,000	21	665,826,000

X.XX. 1.201 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	1,300,000															3	1,300,000
X.XX. 1.20 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	4,650,786,282															100	4,650,786,282
X.XX. 1.202 .1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Org/Bln	812	4,650,786,282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	812	4,650,786,282
X.XX. 1.20 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	110,112,451	100	25,662,000	100	15,620,000	100	17,627,500	100	30,200,000	100	35,160,000	100	15,487,500	100	29,929,700	100	279,799,151
X.XX. 1.206 .1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	2,757,000	1	756,000				1	2,000,000	1	2,000,000				1	1,272,500	8	8,785,500
X.XX. 1.206 .3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	3	3,800,000	1	2,000,000			1	1,487,000	1	2,500,000	1	2,000,000			1	724,100	8	12,511,100
X.XX. 1.206 .4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	31,885,451	1	8,752,500	1	13,188,000	1	6,012,500	1	17,000,000	1	18,000,000	1	13,810,000	1	15,371,100	9	124,019,551
X.XX. 1.206 .5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	Paket	1	6,772,000	1	2,238,500	1	2,432,000	1	1,213,000	1	3,700,000	1	5,000,000	1	1,677,500	1	6,301,000	8	29,334,000
X.XX. 1.206 .8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	4	12,530,000	1	5,465,000			1	2,465,000			1	3,385,000			1	531,000	8	24,376,000

X.XX. 1.206 .9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	3	52,368,000	1	6,450,000			1	6,450,000	1	5,000,000	1	4,775,000			1	5,730,000	8	80,773,000
X.XX. 1.20 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100	143,985,700	100	6,500,000	100	17,200,000	100	10,640,000	100	6,000,000	100	23,930,000	100	59,274,500	100	28,985,800	100	296,516,000
X.XX. 1.207 .5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan	Unit	10	31,846,000		-	2	9,018,000					2	7,000,000			2	12,768,000	16	60,632,000
X.XX. 1.207 .6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	112,139,700	3	6,500,000	3	8,182,000	3	10,640,000	3	6,000,000	3	16,930,000	3	59,274,500	3	16,217,800	24	235,884,000
X.XX. 1.20 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	69,000,000	100	50,900,000	100	47,270,000	100	66,148,000	100	44,800,000	100	22,910,000	100	38,976,000	100	58,020,000	100	398,024,000
X.XX. 1.208 .1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Laporan	1	1,000,000	1	1,600,000	1	1,430,000	1	1,000,000	1	1,500,000	1	1,800,000	1	1,380,000	1	1,200,000	8	10,910,000
X.XX. 1.208 .2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	Laporan	1	26,000,000	1	13,300,000	1	9,840,000	1	11,148,000	1	8,500,000	1	9,110,000	1	1,596,000	1	8,820,000	8	88,314,000
X.XX. 1.208 .4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	42,000,000	1	36,000,000	1	36,000,000	1	54,000,000	1	34,800,000	1	12,000,000	1	36,000,000	1	48,000,000	8	298,800,000
X.XX. 1.20 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan	%	100	23,444,000	100	16,938,000	100	19,910,000	100	5,628,500	100	4,000,000	100	18,000,000	100	4,982,000	100	13,474,500	100	106,377,000
X.XX. 1.209 .1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	2	19,744,000	3	5,096,000	3	4,377,000	3	3,786,500	3	2,500,000	3	9,000,000	3	4,982,000	3	7,800,000	23	57,285,500

